

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI INDONESIA

FAKHRUR ROZI MADDARANGANG



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

FAKHRUR ROZI MADDARANGANG

A011171527



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh:

FAKHRUR ROZI MADDARANGANG

A011171527

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 15 Februari 2022

Pembimbing I



Dr. Madris, SE., DPS., MSi., CWM®.
NIP 19601231 198811 1 001

Pembimbing II



Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MSi., CWM®.
NIP 19770119 200801 2 008

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sanusi Fattah, SE., MSi., CSF., CWM®.
NIP. 19690413 199403 1003

SKRIPSI

ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI INDONESIA

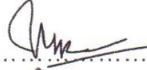
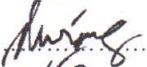
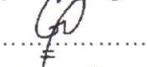
disusun dan diajukan oleh:

FAKHRUR ROZI MADDARANGANG

A011171527

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 15 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Madris, SE., DPS., MSi., CWM®.	Ketua	1. 
2.	Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MSi., CWM®.	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA.	Anggota	3. 
4.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si, CSF.	Anggota	4. 



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Sanusi Fattah, SE., MSi., CSF., CWM®.
NIP. 19690413 199403 1003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Fakhrur Rozi Maddarangang**
Nomor Pokok : A011171527
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Determinan Pengangguran Terselubung di Indonesia*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi

Makassar, 8 April 2022
Yang Menyatakan



(Fakhrur Rozi Maddarangang)
A011171527

PRAKATA

Alhamdullillahirabbil'alamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula salam dan sholawat senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas sunnah dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Determinan Pengangguran Terselubung di Indonesia" dengan baik. Skripsi ini dibuat bukan hanya sebagai pemenuhan persyaratan bagi Penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, namun penulis juga mengharapkan masalah ekonomi yang penulis kaji dapat tergambarkan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Penulis dengan terbuka akan menerima kritik dan saran dari pembaca terkait tulisan ini agar skripsi ini dapat berguna lebih baik bagi para pembaca. Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan banyak pembelajaran terkait masalah yang diteliti oleh penulis dan mampu meningkatkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang lebih baik.

Tugas akhir ini memerlukan proses yang tidak singkat. Perjalanan yang dilalui penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari tangan-tangan berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, baik berupa materi maupun dorongan moril. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yaitu ayahanda H. Muchlis S.E., M.Si dan ibunda Hj. Nurliah Sondeng, S.T., serta keluarga besar atas kasih sayang dan segala dukungan selama ini, baik spritual maupun materil karena penulis tidak akan mampu sampai di titik ini jika tanpa nasihat, motivasi dan do'a yang tiada hentinya terpanjatkan kepada Allah SWT.
2. Bapak Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Unhas.
3. Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Madris, S.E., DPS., M.Si., CWM., selaku dosen pembimbing I, dan ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si., CWM., selaku dosen pembimbing II, atas arahan dan bimbingan serta waktu yang telah diluangkannya dari awal penelitian hingga terselesainya penulisan tugas akhir ini.
5. Sahabat-sahabat saya, Fandy Suryansyah, Adinda Asia, Andi Nur Wahyuningsih, Sul Iman Syahrul, Syafira Bestari dan Anjalie yang telah menyemangati dan memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar yang telah banyak membantu selama perkuliahan baik dari segi ilmu pengetahuan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya serta pertolongan jasa dalam pengurusan segala bentuk administrasi.
7. Saudara-saudariku, yang telah banyak membantu dalam hal apapun, dan telah mewarnai kehidupan perkuliahan.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dengan semua bantuan, dan dukungan hingga terselesainya skripsi ini.

Tiada imbalan yang dapat diberikan penulis selain memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua, Amin. Akhir kata penulis menyadari bahwa di dalam tugas akhir ini terdapat banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan, sehingga dengan segala keterbukaan penulis mengharapkan masukan dari semua pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Gowa, 22 Januari 2022

Fakhrur Rozi Maddarangang

ABSTRAK
ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI INDONESIA

Fakhrur Rozi Maddarangang
Dr. Madris, SE., DPS., MSi., CWM®.
Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MSi., CWM®.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pendidikan, struktur ekonomi dan struktur lapangan pekerjaan sebagai determinan terhadap pengangguran terselubung di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Adapun data yang digunakan adalah data *time series* pada tahun 2006-2020 dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terselubung di Indonesia, pendidikan tidak signifikan terhadap pengangguran terselubung di Indonesia, struktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terselubung di Indonesia dan struktur lapangan pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terselubung di Indonesia.

Kata Kunci: pengangguran terselubung, pengeluaran pemerintah, pendidikan, struktur ekonomi dan struktur lapangan pekerjaan.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF DISGUISED UNEMPLOYMENT IN
INDONESIA

Fakhrur Rozi Maddarangang
Dr. Madris, SE., DPS., MSi., CWM®.
Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MSi., CWM®.

This study aims to analyze the effect of government expenditure, education, economic structure and employment structure as determinants of disguised unemployment in Indonesia. This study uses secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) and Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). The data used is time series data in 2006-2020 and the analytical method used is multiple linear regression analysis. The results show that government spending has a positive and significant effect on the level of disguised unemployment in Indonesia, education is not significant on disguised unemployment in Indonesia, economic structure has a negative and significant effect on the level of disguised unemployment in Indonesia and the structure of employment has a positive and significant effect on the level of disguised unemployment in Indonesia.

Keywords: disguised unemployment, government expenditure, education, economic structure and employment structure.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Pengangguran.....	9
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	11
2.1.3 Teori Pendidikan.....	12
2.1.4 Teori Struktur Ekonomi.....	13
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	16
2.3 Studi Empiris.....	19
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	27
2.5 Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	30

3.2	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4	Metode Analisis Data.....	30
3.5	Definisi Operasional.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....		33
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	33
4.1.1	Keadaan Geografis NKRI.....	33
4.1.2	Perkembangan Pengangguran Terselubung Indonesia.....	33
4.2	Perkembangan Variabel Penelitian.....	35
4.2.1	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	35
4.2.2	Perkembangan Pendidikan.....	37
4.2.3	Perkembangan Struktur Ekonomi.....	38
4.3.4	Perkembangan Struktur Lapangan Pekerjaan.....	40
4.3	Hasil Estimasi Penelitian.....	41
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	45
BAB V PENUTUP.....		49
5.1	Kesimpulan.....	49
5.2	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....		51
LAMPIRAN.....		54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Terselubung di Indonesia (Jiwa).....	3
Tabel 4.2 Hasil Estimasi Linear Berganda.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terselubung di Indonesia.....	35
Gambar 4.2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Indonesia.....	36
Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia.....	38
Gambar 4.4 Struktur Ekonomi Sektor Pertanian di Indonesia.....	39
Gambar 4.5 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Indonesia.....	41
Gambar 4.6 Bagian Hasil Penelitian.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingkat pengangguran yang tinggi karena pertumbuhan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pengangguran yang tinggi termasuk ke dalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran (Sukirno, 1994).

Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (Samuelson, 2008).

Selama ini, pengangguran cenderung dilihat dari pengangguran terbuka dan kurang melihat pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yang angkanya lebih besar dari pengangguran terbuka. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Indonesia selama satu dekade terakhir memperlihatkan peningkatan. Akan tetapi, pada tiga tahun di antaranya mengalami penurunan pertumbuhan pengangguran yakni pada tahun 2012, 2014 dan 2016 namun secara umum mengalami peningkatan dengan rerata 2,13 persen per tahun dengan puncak peningkatan pada tahun 2020 yang merupakan tahun pertama era pandemi Covid-19 yang meningkat sekitar 37,49 persen dari tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2021).

Masalah pada saat ini, jumlah pengangguran di tanah air hampir menyentuh 10 juta orang. Angka pengangguran ini meningkat akibat adanya pandemi yang membuat seluruh sektor industri tertekan. Pandemi membuat banyak bisnis harus

gulung tikar dan membuat para karyawannya mengalami PHK. Jumlah angkatan kerja yang menganggur di Indonesia mencapai 9,77 juta orang. Belum lagi, ada 24,03 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja. Produktivitas bisnis yang menurun akibat pandemi membuat badai PHK tidak bisa dibendung lagi. Hal ini tentunya juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pekerja yang saat ini masih aktif bekerja di perusahaan (BPS, 2020).

Dalam ketenagakerjaan penduduk/masyarakat yang bekerja, terdapat fenomena mengenai waktu dan pendapatan dari tinggi rendahnya produktivitas penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja dengan produktivitas rendah disebut sebagai pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*), yang memiliki jam kerja per minggu lebih rendah atau kurang dari 35 jam per minggu.

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) mereka yang menjadi pengangguran terselubung ialah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Proporsi jumlah penduduk pengangguran terselubung dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan utilitas, kegunaan dan produktivitas tenaga kerja. Pengangguran terselubung termasuk dalam kategori bekerja tetapi mereka tidak bekerja secara penuh, dalam artian mereka belum menggunakan seluruh kemampuannya dalam bekerja, baik jam kerja yang dibawah jam kerja normal, adanya penghargaan berupa uang, maupun produktivitas kerja yang relatif rendah (Kinanti, 2015).

Di negara berkembang seperti Indonesia masih banyak tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara memadai (*underutilization*) yang dikenal sebagai pengangguran terselubung. Sullivan dan Hauser (1979) dengan konsep "*Labor Utilization Framework*", pengangguran terselubung merupakan refleksi dari penduduk yang bekerja tetapi tidak dimanfaatkan secara penuh. Hal tersebut dapat didasarkan atas tingkat pendapatan, jam kerja dan kesesuaian pendidikan dan jenis pekerjaan. Dalam hal ini menggambarkan produktivitas angkatan kerja dengan melihat pendapatan yang dimana akan berkaitan dengan produktivitas (Harfina, 2009).

Di antara angkatan kerja yang masih aktif bekerja saat ini, salah satu angkatan kerja yang cukup rentan adalah golongan pengangguran terselubung. Walaupun disebut pengangguran, namun sebenarnya mereka aktif bekerja tetapi dengan produktivitas yang sangat rendah. Rendahnya produktivitas para pekerja

tersebut dipicu dengan bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta minat dan bakat yang dimiliki.

Dengan adanya pengangguran terselubung yaitu tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dapat diasumsikan akan mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dari tenaga kerja normal 35 jam dalam seminggu atau lebih. Hal ini dikhawatirkan tenaga kerja tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya karena pendapatan yang minimum.

Di Indonesia, jumlah penduduk bekerja dan pengangguran terselubung dalam lima belas tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Berikut ini data jumlah penduduk bekerja dan pengangguran terselubung di Indonesia tahun 2006 sampai 2020:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran Terbuka dan Pengangguran Terselubung Pada Tahun 2006-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Bekerja	Pengangguran Terbuka	Pengangguran Terselubung
2006	95.456.935	9.812.973	31.541.525
2007	99.930.217	9.103.643	32.719.758
2008	102.552.750	8.604.176	33.339.365
2009	104.870.663	8.253.321	33.967.829
2010	108.207.767	7.726.035	35.756.807
2011	107.416.309	8.034.740	36.242.623
2012	112.504.868	6.896.548	38.001.979
2013	112.761.072	6.957.358	44.839.172
2014	114.628.026	6.808.905	38.530.962
2015	114.819.199	7.095.826	36.289.411
2016	118.411.973	6.642.912	34.452.424
2017	121.022.423	6.656.233	36.051.475
2018	126.282.186	6.692.956	38.828.045
2019	128.755.271	6.733.901	40.238.579
2020	128.454.184	9.081.711	50.339.304

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terselubung jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Jumlah pengangguran terselubung di Indonesia per tahunnya cenderung meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan jumlah 50,33 juta tenaga kerja atau 39,2% dari 128,45 juta jumlah penduduk bekerja yang disebabkan pandemi Covid-19 sedangkan jumlah pengangguran terbuka cenderung menurun tiap tahunnya akan tetapi meningkat pesat pada tahun 2020 yang juga disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Tentunya pengangguran terselubung ini dapat menjadi masalah besar dalam pertumbuhan ekonomi karena dalam lapangan pekerjaan yang mereka tempati bekerja akan menghasilkan output yang tidak maksimal karena jumlah jam kerja mereka berada di bawah 35 jam kerja dalam seminggu. Apabila semua tenaga kerja di Indonesia bekerja sesuai standar jam kerja, tentunya akan memberikan output yang baik terhadap tempat kerjanya. Secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan terus berupaya dalam mengatasi masalah pengangguran terselubung di Indonesia.

Dalam suatu negara, rencana pengeluaran dan kebijakan-kebijakan pemerintah ditunjukkan oleh anggaran belanja. Anggaran belanja digunakan untuk merencanakan serta mengontrol keadaan fisik suatu negara. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Guritno, 1999).

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002).

Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai bentuk arus kas keluar yang akan mengakibatkan berkurangnya jumlah ekuitas dana yang dimiliki, kecuali

yang berhubungan dengan penyaluran kepada para ekuitas dana. Sehingga dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di suatu daerah (Halim, 2002: 68).

Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran, misalnya pengeluaran pembangunan yang lebih banyak ditujukan untuk membiayai proyek-proyek yang padat modal sehingga pengeluaran pemerintah menjadi tidak tepat sasaran dan jumlah pengangguran terbuka setiap tahunnya bertambah (Rizka Julita Rachim, 2013).

Pendidikan mampu mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena selain akan berpengaruh terhadap produktivitas, juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia. Dalam teknologi modern, pendidikan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan juga membangun pertumbuhan yang berkelanjutan karena merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan produktivitas. Dengan begitu pendidikan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi pendapatan (Todaro, 2000).

Dalam teori *Human Capital* menjelaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, tentunya akan mendorong produktivitas penduduk lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pendidikan dapat diukur dengan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah. Dengan tingginya tingkat pendidikan tenaga kerja tentunya akan meningkatkan peluang dalam bersaing di dunia kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terselubung ke depannya.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan terjadinya transformasi struktural perekonomian suatu wilayah. Transformasi struktural merupakan suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda (Ternitope, 2017).

Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Struktur ekonomi di Indonesia mengandalkan sektor pertanian atau sektor primer. Sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian secara luas, sektor pertambangan dan penggalian kontribusinya terus mengalami penurunan. Sektor industri didominasi oleh industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang sebagian besar menghasilkan produk kerajinan yang menunjang sektor pariwisata.

Sektor primer menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam menyumbangkan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB). Seiring dengan berjalannya perekonomian Indonesia, pemerintah mulai mencanangkan Indonesia menuju era industrialisasi di masa depan, dengan pertimbangan sektor pertanian juga mampu semakin kuat.

Lapangan pekerjaan menurut Sensus Penduduk tahun 2000 menyatakan suatu bidang mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan ataupun instansi yang bisa ditempati seseorang bekerja atau pernah ditempati bekerja. Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi di perdesaan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurun sehingga mengakibatkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian (Supriyadi, 2004).

Struktur lapangan pekerjaan merupakan sektor-sektor lapangan kerja yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia memiliki sembilan sektor lapangan kerja yang berperan penting. Dalam Sembilan sektor tersebut, dapat dikategorikan menjadi tiga sektor utama yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, yaitu sektor pertanian (Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan), sektor industri manufaktur (Pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas, air dan konstruksi) dan sektor jasa-jasa (Perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah pengangguran terselubung yang dihubungkan dengan pengeluaran pemerintah, pendidikan, struktur ekonomi dan struktur lapangan pekerjaan yang selanjutnya diangkat menjadi penelitian dengan judul "**Analisis Determinan Pengangguran Terselubung di Indonesia**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan singkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran terselubung di Indonesia?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran terselubung di Indonesia?
3. Apakah struktur ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran terselubung di Indonesia?
4. Apakah struktur lapangan pekerjaan berpengaruh terhadap pengangguran terselubung di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran terselubung di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pengangguran terselubung di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh struktur ekonomi terhadap pengangguran terselubung di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh struktur lapangan pekerjaan terhadap pengangguran terselubung di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini ialah:

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terselubung.
2. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dan menambah pengetahuan peneliti secara lebih dalam mengenai masalah pengangguran terselubung. Sehingga ilmu yang didapat dapat digunakan dengan baik dan dilakukan dalam kehidupan nyata.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat menambah wawasannya mengenai masalah pengangguran terselubung dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengangguran

Sadono Sukirno (1994) mengatakan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksikan. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai (GDP) dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional (GDP), semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Marius (2004) dalam Yeny Dharmayanti (2011) mengatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

b. Pengangguran Tersembunyi/ Terselubung (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi

karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

c. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Mereka yang menjadi pengangguran terselubung ialah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam seminggu (BPS, 2018). Proporsi jumlah penduduk pengangguran terselubung dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan utilitas, kegunaan, dan produktivitas tenaga kerja. Pengangguran terselubung termasuk dalam kategori bekerja tetapi mereka tidak bekerja secara penuh, dalam artian mereka belum menggunakan seluruh kemampuannya dalam bekerja, baik jam kerja yang di bawah jam kerja normal, adanya penghargaan (dalam wujud rupiah), maupun produktivitas kerja yang relatif rendah (Kinanti, 2015).

Teori klasik menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas agar mampu menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran. Pengangguran dapat terjadi disebabkan adanya kesalahan dalam alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004).

Sehingga jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relative stabil (Tohar, 2000).

Teori Keynes mengatakan bahwa sesungguhnya pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah sehingga mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh produksi yang rendah, melainkan

rendahnya konsumsi. Dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, maka upah akan mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya akan merugikan disebabkan penurunan upah sama dengan menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Guritno (1999) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro.

Dalam teori makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga landasan utama yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- c) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Transfer payment adalah mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pension, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Teori Makro yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan tiga tahap:

- a. Tahap awal adalah tahap permulaan perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

- b. Tahap menengah adalah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar.
- c. Tahap lanjut atau lepas landas adalah pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + (X - M)$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*government expenditures*). Variabel I melambangkan investasi (*investment*). Variabel X dan M melambangkan net ekspor. Dengan membandingkan variabel nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

2.1.3 Teori Pendidikan

Pendidikan mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh produktivitas perorangan, jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang (Mankiw, 2006).

Teori *Human Capital* berasumsi bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap tambahan satu tahun sekolah berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang, akan tetapi di pihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun untuk mengikuti sekolah tersebut dan berharap untuk meningkatkan penghasilan dengan peningkatan pendidikan (Mankiw, 2006).

Teori Human Capital menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi di masa depan, baik bagi individu maupun masyarakat, dalam hubungan dengan kesempatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih terbuka bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada umumnya tingkat kelangkaan dari lulusan pendidikan yang lebih tinggi juga lebih akurat, sehingga tingkat persaingannya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga lebih besar. Kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan tinggi lebih terbuka, sehingga secara teoritis tingkat pengangguran pada kelompok ini cenderung lebih kecil dibanding kelompok yang berpendidikan lebih rendah, namun demikian kesempatan kerja itu akan menyempit dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan tinggi.

Peranan pendidikan formal untuk meningkatkan keterampilan telah diakui semua negara. Pendidikan formal seperti yang dikatakan oleh Todaro (2010), tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pekerja untuk kepentingan pembangunan, tetapi pendidikan formal juga bisa memberikan nilai-nilai, cita-cita, sikap dan aspirasi langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan.

2.1.4 Teori Struktur Ekonomi

Berdasarkan lapangan usaha maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan dalam tiga 3 kelompok utama yaitu:

1. Sektor primer, yang terdiri dari lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian;
2. Sektor sekunder, terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas dan air, serta bangunan;
3. Sektor tersier, terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, sewa, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lain. (Sukirno, 2005)

Hukum Engels (1896) mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi bertambah besar, sehingga peranan sektor industri akan semakin besar dibandingkan sektor pertanian.

Kuznets (1971) menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi juga disebabkan oleh perubahan teknologi yang berlangsung setiap tahun. Proses transformasi struktural tersebut akan berjalan cepat jika terjadi pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan uang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri/ekspor. Terdapat dua macam struktur ekonomi, yaitu:

- 1) Struktur ekonomi agraris adalah struktur ekonomi dimana didominasi oleh sektor pertanian. Sektor tersebut menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk. Pada umumnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia disebut negara agraris dan negara-negara yang termasuk belum berkembang dimana pertaniannya masih sangat tradisional disebut negara agraris tradisional.
- 2) Struktur ekonomi industri adalah struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri di negara tersebut. Sebagian besar pendapatan negara tersebut diperoleh dari sektor industri serta laju pertumbuhan ekonominya juga dari sektor industri. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jepang dan negara-negara eropa termasuk negara industri.

Menurut Teori W. Arthur Lewis mengatakan bahwa perekonomian suatu negara dapat dibagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional (di pedesaan) yang berfokus pada sektor pertanian dan perekonomian modern (di perkotaan) yang berfokus pada sektor industri.

a. Perekonomian Tradisional

Teori ini mengasumsikan bahwa daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mencapai surplus tenaga kerja. Nilai produk marginal dari tenaga kerja bernilai nol dimana fungsi produksi pada sektor pertanian telah mencapai tingkat berlakunya hukum *Law of Diminishing Return* yaitu penambahan variabel dalam kasus ini tenaga kerja menyebabkan turunnya total produksi. Sedangkan pengurangan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor pertanian tidak akan mengurangi tingkat produksi yang ada, akibat proporsi variabel tenaga kerja yang terlalu besar.

Tentunya hal ini disebabkan adanya kelebihan jumlah penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Situasi tersebut membuat Lewis mengartikan kondisi surplus tenaga kerja

sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya.

b. Perekonomian Modern

Teori mengatakan bahwa sektor industri berperan penting dalam perekonomian modern. Ciri perekonomian modern adalah tingginya tingkat produktivitas dan menjadi tempat pengumpulan tenaga kerja yang dikirim secara perlahan dari pedesaan sehingga penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan menambah nilai output yang diproduksi.

Toscano (2004) mengatakan bahwa pekerja yang dipekerjakan di pedesaan secara signifikan lebih cenderung memasuki setengah pengangguran namun begitu mereka menganggur, mereka juga memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk memasuki kembali lapangan kerja yang memadai. Hasilnya menunjukkan bahwa transisi tenaga kerja masuk dan keluar dari pekerjaan yang memadai, dan khususnya setengah pengangguran, sangat berbeda antara pekerja pedesaan dan perkotaan dan harus diperhitungkan saat mengevaluasi kesulitan pekerjaan di pedesaan Kanada.

Wu (2011) mengatakan bahwa tempat tinggal seseorang juga terkait dengan besarnya jumlah pengangguran terselubung. Seseorang yang tinggal di daerah non-metropolitan atau di daerah pedesaan tampaknya lebih mungkin untuk menjadi pengangguran terselubung dari pada mereka yang tinggal di daerah metropolitan atau di kota besar.

Inti dari perekonomian modern ialah adanya proses pengalihan kerja, peningkatan output dan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya perluasan output pada sektor modern tersebut.

Proses pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern di atas diasumsikan akan terus berjalan hingga semua surplus tenaga kerja pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Sehingga tenaga kerja tambahan hanya dapat diperoleh dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi sebab hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya produksi pangan. Perubahan struktural perekonomian terjadi dengan sendirinya dan perekonomian tersebut pada akhirnya akan beralih dari perekonomian tradisional yang terjadi di pedesaan akan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berdasarkan pola kehidupan perkotaan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran Terselubung

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pengangguran terselubung adalah dijelaskan menurut teori ekonomi Keynesian dalam Sadono Sukirno (2000), menjelaskan variabel pemerintah dalam hal ini adalah anggaran dijadikan salah satu faktor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor perekonomian lain. *Multiplier effect* tersebut akan semakin besar jika asumsi belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini disebabkan ketika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka akan menstimulus kegiatan perekonomian di suatu daerah dan menciptakan *multiplier effect* yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran terdidik di daerah tersebut.

Keynes juga berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta sehingga perlu dilakukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang teguh (Sukirno, 2004). Salah bentuk campur tangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan kebijakan fiskal. Dalam hal ini, Keynes mengisyaratkan kebijakan fiskal yang ekspansif melalui pengurangan pajak dan penambahan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).

2.2.2 Hubungan antara Pendidikan dengan Pengangguran Terselubung

Pendidikan merupakan investasi bagi manusia yang akan dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan meningkatnya pendidikan, diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan dengan upah yang relatif tinggi. Keadaan tersebut menyebabkan tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih memilih menganggur daripada bekerja dengan upah yang kecil dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Keadaan sebaliknya, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memilih sektor tradisional dengan tingkat produktivitas yang tidak maksimal (Harfina, 2009).

Pratomo (2015) mengatakan bahwa dimana para pekerja dengan pendidikan tinggi, seperti universitas dan sekolah menengah atas cenderung untuk

menjadi pengangguran terselubung. Hal ini disebabkan ketidakmampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap pekerja terdidik secara optimal dan diduga karena ketidakcocokan antara sistem pendidikan dan pasar tenaga kerja. Disisi lain pekerja disektor pertanian cenderung bekerja kurang dari jam kerja normal untuk menjadi pengangguran terselubung dan paruh waktu pekerja, sementara pekerja disektor industri dan pedagang tidak terlalu menjadi pengangguran terselubung.

Hubungan antara rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan dengan tingkat pengangguran terselubung dijelaskan menurut Todaro (2006) bahwa pendidikan merupakan salah satu pembekalan ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran penting pendidikan dalam kemajuan pembangunan ekonomi adalah dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,

Berdasarkan Teori *Human Capital* menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi di masa depan, baik bagi individu maupun masyarakat, dalam hubungan dengan kesempatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih terbuka bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pada umumnya tingkat kelangkaan dari lulusan pendidikan yang lebih tinggi juga lebih akurat, sehingga tingkat persaingannya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga lebih besar. Dengan meluasnya peluang kerja masyarakat serta meningkatnya kualitas tenaga kerja maka akan mengurangi peluang menjadi pengangguran terselubung.

2.2.3 Hubungan antara Struktur Ekonomi dengan Pengangguran Terselubung

Marhaeni (2015) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terselubung baik dari segi jam kerja dan penghasilan paling tinggi terdapat di sektor pertanian dan yang paling rendah di sektor industri, sedangkan tingkat pengangguran terselubung paling tinggi terdapat pada responden yang berpendidikan rendah bahkan untuk pendidikan tinggi tidak ada yang tergolong pengangguran terselubung dari segi jam kerja dan tingkat pengangguran terselubung pada sektor informal lebih tinggi di bandingkan formal begitu juga pada segi penghasilan lebih tinggi laki-laki dari pada perempuan.

Hubungan antara struktur ekonomi dalam hal ini sektor pertanian dengan tingkat pengangguran terselubung dijelaskan berdasarkan teori Hukum Engels

(1896) yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, sebaliknya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi bertambah besar, sehingga peranan sektor industri akan semakin besar dibandingkan sektor pertanian. Tentunya hal ini menjelaskan bahwa hasil output sektor pertanian lebih digunakan pada sektor lainnya dibandingkan membeli bahan pertanian. Maka hal ini mampu menyebabkan tenaga kerja sektor pertanian menjadi pengangguran terselubung. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Kuznets (1971) menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi secara perlahan akan berubah dari sektor pertanian menuju sektor industri seiring berubahnya teknologi setiap tahunnya.

2.2.4 Hubungan antara Struktur Lapangan Pekerjaan dengan Pengangguran Terselubung

Lapangan pekerjaan menurut Sensus Penduduk tahun 2020 menyatakan suatu bidang mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan ataupun instansi yang bisa ditempati seseorang bekerja atau pernah ditempati bekerja. Lapangan pekerjaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan ini dapat dibagi menjadi:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Konstruksi
6. Perdagangan, rumah makan dan hotel
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan
9. Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya

Dari setiap sektor lapangan pekerjaan tersebut akan menyerap tenaga kerja. Dengan berbagai sektor yang tersedia tentunya tenaga kerja diharapkan mampu melihat potensi dan peluang di setiap sektor lapangan kerja agar dapat menjadi peluang usaha. Terciptanya lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di

masing-masing sektor kegiatan yang setiap tahun semakin luas tentunya akan mampu meningkatkan pendapatan bagi tenaga kerja.

Kebijakan dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja tentunya juga menyangkut mengenai pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pengidentifikasian secara menyeluruh, tidak hanya jumlah angkatan kerja, namun lokasi serta mengelompokkan sesuai lingkungan hidup, penyebaran antar daerah dan sebagainya. Kebijakan tersebut tentunya merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan kuantitas dan kualitas angkatan kerja yang tersedia sehingga mampu memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di berbagai daerah.

Dalam rangka mengatasi masalah perluasan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran, Departemen Tenaga Kerja dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memandang perlu untuk menyusun program yang mampu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Hubungan struktur lapangan pekerjaan dengan pengangguran terselubung, menurut Sukirno (2002) dan Supriyadi (2004) yang berdasarkan analisis inferensial, sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan peluang terjadinya pengangguran terselubung yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya (manufaktur dan jasa).

2.3 Studi Empiris

Syahri Fauzi, dkk (2018) melakukan penelitian tentang "Analisis Determinan Setengah Pengangguran di Sumatera Barat". Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat dengan menggunakan metode penelitian yaitu teknik analisis regresi logistic. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap setengah pengangguran. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat di Sumatera Barat baik itu yang berpendidikan rendah ataupun tinggi mereka cenderung untuk mencari pekerjaan ke wilayah yang lebih besar peluang untuk tidak menganggur atau setengah pengangguran dengan harapan mendapatkan upah yang besar, seperti merantau ke wilayah pulau jawa.

Putri dan Adry (2018) melakukan penelitian tentang “Analisis Setengah Menganggur (Underemployment) di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pendidikan tidak signifikan terhadap peluang kerja paruh waktu/setengah pengangguran. Hal ini disebabkan sebagian besar pekerja di Sumatera Barat yang bekerja penuh merupakan buruh/pegawai/karyawan dengan jenjang pendidikan banyak didominasi pada level SD.

Ni Made Sri Sudarmi (2020) melakukan penelitian tentang “Tipe Pengangguran Terdidik: Antara Setengah Menganggur dan Terselubung pada Alumni Prodi Pendidikan Geografi Undiksha Tahun 2017-2019”. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan metode wawancara dan kuisisioner yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tipe pengangguran yang dialami alumni Program Studi Pendidikan Geografi Undiksha tahun 2017-2019 meliputi tipe pengangguran terbuka sebesar 6%, tipe setengah menganggur sebesar 14,3%, tipe pengangguran terselubung sebesar 51% dan tipe pengangguran musiman sebesar 6%. Tipe pengangguran yang paling mendominasi adalah tipe setengah menganggur dan tipe pengangguran terselubung. Tipe setengah menganggur yang terjadi pada alumni disebabkan oleh faktor tempat kerja yang terbatas sebanyak 12,9% dan jam kerja yang pendek sebanyak 9,7%, sedangkan penyebab timbulnya tipe pengangguran terselubung disebabkan oleh faktor minimnya lowongan kerja sebesar 38,7% dan faktor saingan sebesar 19,3%.

Dessy Adriani (2015) melakukan penelitian tentang “Finding Policies of Disguised Unemployment Arrangement: Through Various Technological Innovation of Agriculture and Income Diversification for Tidal Rice Farmer”. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lahat dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode acak sederhana. Analisis rasionalitas sosial-ekonomi penyelesaian pengangguran terselubung dilakukan dengan analisis tabulasi, matematis, dan simulasi. Hasil analisis menunjukkan telah terjadi pengangguran terselubung di tingkat rumah tangga petani. Petani melalui rasionalitas sosial mengatasi pengangguran terselubung dengan: (1) diversifikasi struktur pekerjaan (okupasi baru) dan (2) pengurangan tenaga kerja luar keluarga dalam kegiatan usaha tani dengan memaksimalkan potensi tenaga kerja rumah tangga. Rasionalitas sosial

ini berdampak secara ekonomi pada pengurangan pengangguran terselubung sebesar 69% dan peningkatan pendapatan 267% di tingkat mikro. Dengan demikian, rasionalitas sosial-ekonomi rumah tangga petani terbukti dapat menyelesaikan persoalan pengangguran terselubung di tingkat mikro.

Manahel Mustafa Al-Omari (2013) melakukan penelitian mengenai “The Disguised Unemployment in Iraq 1996-2008”. Penelitian ini dilakukan di Irak dan dapat disimpulkan bahwa Menurunnya tingkat pertumbuhan lapangan kerja setelah tahun 2006, menunjukkan rendahnya tingkat permintaan tenaga kerja akibat rendahnya investasi, sehingga tidak mampu menciptakan lapangan kerja serta kebijakan pekerjaan di Irak masih di bawah standar persyaratan lapangan pekerjaan.

Ernesto Hernandez Cata (2015) melakukan penelitian mengenai “Estimating Disguised Unemployment in Cuba”. Penelitian ini dilakukan di Kuba, Amerika Utara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa produktivitas yang rendah menjadi salah satu alasan utama pertumbuhan ekonomi yang buruk dan pendapatan per kapita yang rendah di Kuba. Serta investasi yang sangat rendah dan inefisiensi dasar dari sistem ekonomi yang sebagian besar dijalankan oleh negara, menghambat kewirausahaan dan mendistorsi alokasi sumber daya dengan mengendalikan harga. Namun satu faktor penting yang secara umum diakui, termasuk oleh pejabat pemerintahnya adalah kurangnya insentif untuk upaya kerja dan pencarian kerja yang diakibatkan oleh upah yang rendah tetapi juga dari adanya pengangguran terselubung yang disubsidi di negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terselubung di Kuba sangat tinggi pada periode Pasca Soviet, tetapi terus turun mulai tahun 1994 sebelum stabil pada tahun 2000-an. Namun demikian, pengangguran terselubung tetap tinggi, terutama jika subsidi minyak diperhitungkan. Oleh karena itu, upaya tambahan untuk menurunkan pengangguran efektif akan diperlukan, yang melibatkan pemotongan tambahan subsidi pemerintah untuk kerugian perusahaan dan transfer tenaga kerja lebih lanjut dari negara ke sektor swasta. Yang terakhir ini akan membutuhkan perluasan yang signifikan dalam daftar kegiatan yang memenuhi syarat untuk privatisasi, dan kerangka peraturan dan pajak yang lebih menguntungkan untuk kegiatan non-negara. Upaya berkelanjutan untuk memperkenalkan fleksibilitas

upah juga akan membantu meningkatkan insentif, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

P. Alan Jirang (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah secara langsung terhadap pengangguran maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui pengaruh investasi swasta secara langsung terhadap pengangguran maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bersifat eksplanatif (*explanatory research*), yakni berusaha menjelaskan hubungan kausalitas (*causality relationship*) antara pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan *pooling data* atau data panel, yaitu gabungan antara *time series data* (data antar waktu) dan *cross section data* (data antar tempat). Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran sebesar -1.706, yang artinya peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar satu persen dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1.706 persen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, namun secara langsung peningkatan pengeluaran pemerintah mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Timur.

Moch. Rum Alim (2007) melakukan penelitian mengenai “Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode Tahun 1980-2006”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia periode tahun 1980-2006.

Zulhanafi, Hasdi Aimon dan Efrizal Syofyan (2013) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak produktivitas, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah, upah

dan inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Two Stages Least Squared* pada tahun 2000-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat pengangguran secara signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat seperti belanja modal untuk meningkatkan infrastruktur, maka akan berdampak terhadap peningkatan produksi output. Output yang meningkat akan meningkatkan permintaan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah tenaga kerja. Dengan demikian keadaan seperti ini akan mendorong turunnya tingkat pengangguran. Sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka akan menghambat proses terjadinya produksi barang dan jasa (output) sehingga permintaan terhadap faktor-faktor produksi juga akan menurun.

Rizaldi Kaharuddin, Anderson dan Audie (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Manado Tahun 2001-2017)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana dengan semi log. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.

Dewi Harfina S. (2007) melakukan penelitian mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terselubung di Perdesaan Jawa Tengah: Analisis Data Sakernas 2007”. Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengangguran terselubung di perdesaan Jawa Tengah dengan menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh. Faktor tersebut antara lain jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, status dalam rumah tangga, status perkawinan, dan jenis lapangan pekerjaan. Berdasarkan Sakernas tahun 2007, pengangguran terselubung di perdesaan Jawa Tengah relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan lainnya di provinsi Pulau Jawa. Temuan umum hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan sangat mempengaruhi status pengangguran terselubung. Meningkatnya satu jenjang pendidikan akan menurunkan peluang seseorang menjadi pengangguran terselubung. Sementara itu, lapangan pekerjaan di sektor pertanian memiliki peluang yang cukup besar

menjadi pengangguran terselubung dibandingkan dengan pekerja sektor manufaktur dan jasa. Hal itu berkaitan dengan tingkat produktivitas di sektor pertanian yang lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan produktivitas pertanian di perdesaan Jawa Tengah secara tidak langsung akan menurunkan tingkat pengangguran terselubung dan berimplikasi bagi peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan Jawa Tengah.

Elingga Gilang Rakasiwi (2019) melakukan penelitian mengenai “Determinan Pengangguran Terselubung di Jawa Timur” yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor usia, pendidikan, upah, jenis kelamin, status rumah tangga, dan lapangan pekerjaan terhadap pengangguran terselubung di Provinsi Jawa Timur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis probit dengan menggunakan program STATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor usia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terselubung. Pada faktor pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terselubung terbesar ada pada tingkat pendidikan SMP dan akan menurun jika semakin tinggi tingkat pendidikan. Faktor upah berpengaruh negatif dan signifikan dimana semakin tinggi tingkat upah maka probabilitas menjadi pengangguran terselubung semakin kecil. Faktor jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki probabilitas menjadi pengangguran terselubung lebih besar daripada laki-laki karena adanya diskriminasi, hambatan sosial, dll yang dialami oleh perempuan. Hasil dari faktor status rumah tangga menunjukkan bahwa kepala rumah tangga berpeluang menjadi pengangguran terselubung lebih kecil daripada anggota rumah tangga, hal ini dikarenakan adanya perbedaan peran yaitu kepala rumah tangga sebagai pemimpin dalam keluarganya. Pada faktor lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa probabilitas menjadi pengangguran terselubung terbesar ada pada sektor pertanian.

Mustika CD (2010) menulis tentang “Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kota Semarang”. Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Semarang. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda, dengan hasil yang didapatkan bahwa variabel inflasi dan beban tanggungan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan

upah, PDRB dan tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Rizka (2007) membahas tentang “Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upah, Gross Domestic Product (GDP), inflasi, beban tanggungan penduduk terhadap tingkat pengangguran. Metode penelitian yang digunakan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor pada variabel independennya. Variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan, variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) berpengaruh positif dan tidak signifikan.

I Gusti Ayu Putri Wahyuni (2014) meneliti tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan analisis jalur (*Path Analysis*) dan *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Aprianto (2013) meneliti tentang “Hubungan Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Pendidikan dan Pengangguran Terbuka di Indonesia”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif sedangkan uji penelitian yang digunakan adalah uji korelasi pearson. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan, terutama pada tingkat sumber daya manusia lulusan pendidikan Sekolah Menengah Atas terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut juga dicerminkan dengan banyaknya jumlah pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Atas mulai tahun 2004 hingga 2013. Namun, secara keseluruhan pada tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sumber daya manusia di Indonesia, tidak terdapat hubungan yang terlalu signifikan pada tingkat pengangguran terbukanya.

Soebagiyo (2005) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Tingkat Beban/Tanggungannya dan Pendidikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban tanggungan penduduk dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran. Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Adjustment Model*, uji asumsi klasik, uji kebaikan model, uji validitas pengaruh. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel independen pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat pengangguran. Sedangkan variabel independen kesempatan kerja, beban tanggungan dan tingkat pengangguran tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat pengangguran.

Syamsul Arifin dan Firmansyah (2012) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesempatan Kerja terhadap Pengangguran di Provinsi Banten”. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh lulusan pendidikan tinggi dan peluang pengangguran di Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan data panel berupa data sekunder untuk jangka waktu Sembilan tahun dari tahun 2003 sampai 2011. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Provinsi Banten, karena dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi seseorang memiliki skill, motivasi dan agresifitas tinggi dalam mencari kerja. Variabel kesempatan kerja tidak berpengaruh negatif terhadap pengangguran di Provinsi Banten, dalam hal ini dikarenakan kesempatan kerja yang tersedia tidak dinikmati oleh tenaga kerja dari dalam Provinsi Banten sendiri dan disebabkan pula oleh tidak sesuainya antara kesempatan kerja dan SDM yang ada.

Fakih (2009) melakukan penelitian tentang “Pembangunan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan”. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh variabel pembangunan sektor pertanian.

Yamin (2007) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian terhadap Distribusi Pendapatan dan Peningkatan Lapangan Kerja di Sumatera Selatan”. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitiannya adalah distribusi pendapatan masyarakat provinsi Sumatera Selatan relatif positif dengan nilai indeks gini yang jauh lebih rendah dari

satu. Pengaruh PDRB sub-sektor dalam sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan masyarakat tidak berpengaruh dan PDRB sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

Rufaida (2006) meneliti tentang “Analisis Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian dan Hubungannya dengan Kesempatan Kerja serta Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan 1985-2005”. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitiannya adalah PDRB sub-sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja pada sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dan nilai indeks gini berkisar antara 0,25-0,30 yang berarti ketimpangan pendapatan masih berada pada batas aman. Nilai rasio modal berpengaruh secara signifikan pada taraf uji 30 persen terhadap distribusi pendapatan.

Rompas (2015) meneliti tentang “Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan”. Metode analisis menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitiannya adalah sektor pertanian mempunyai hubungan positif dengan korelasi cenderung kurang terhadap penyerapan tenaga kerja, hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran di Minahasa Selatan.

Yasrizal (2006) meneliti tentang “Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Indonesia”. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya adalah distribusi PDRB sektor pertanian berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan dan PDRB sektor pertanian berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian analisis determinan pengangguran terselubung di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah (1) pengeluaran pemerintah, (2) pendidikan, (3) struktur ekonomi, (4) struktur lapangan pekerjaan. Variabel-variabel tersebut bertujuan untuk mengarahkan

peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Pengangguran terselubung merupakan salah satu masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Tingkat pengangguran terselubung yang terus meningkat setiap tahunnya tentunya dapat menjadi masalah besar. Hal ini dikarenakan pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Pengangguran terselubung termasuk dalam kategori bekerja tetapi mereka tidak bekerja secara penuh, dalam artian mereka belum menggunakan seluruh kemampuannya dalam bekerja, baik jam kerja yang dibawah jam kerja normal, adanya penghargaan berupa uang, maupun produktivitas kerja yang relatif rendah (Kinanti, 2015).

Pengeluaran pemerintah adalah anggaran belanja administrasi pemerintahan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pertumbuhan ekonomi. Bidang yang dibiayai pemerintah seperti membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004).

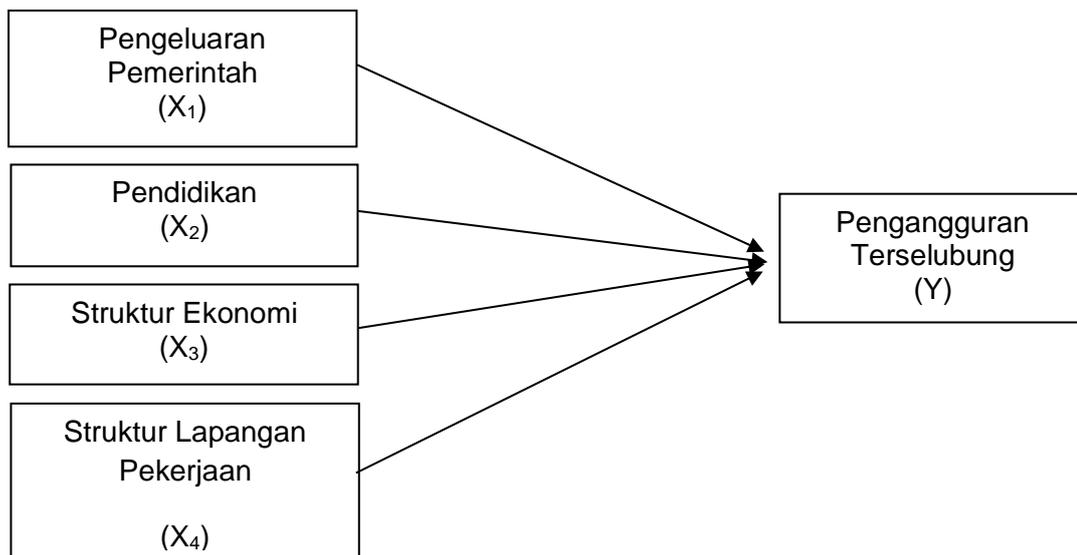
Pendidikan adalah kualitas tenaga kerja yang dapat diukur dengan rata-rata lama sekolah/pendidikan yang ditempu. Pendidikan merupakan investasi bagi manusia yang akan dirasakan manfaatnya dimasa yang akan datang. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dengan meningkatnya pendidikan, diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan dengan upah yang relatif tinggi.

Struktur ekonomi adalah komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kontribusi sektor pertanian/primer terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia.

Struktur lapangan pekerjaan merupakan sektor-sektor lapangan kerja yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia memiliki sembilan sektor lapangan kerja yang berperan penting. Dalam Sembilan sektor tersebut, dapat dikategorikan menjadi tiga sektor utama yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, yaitu sektor pertanian (Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan), sektor industri manufaktur (Pertambangan,

industri pengolahan, listrik, gas, air dan konstruksi) dan sektor jasa-jasa (Perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa masyarakat). Dalam hal ini, yang dimaksud adalah proporsi tenaga kerja di sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil-hasil studi empiris yang dijelaskan sebelumnya maka dapat diuraikan kerangka pikir dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka dirumuskan hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terselubung di Indonesia.
2. Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terselubung di Indonesia.
3. Diduga struktur ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terselubung di Indonesia.
4. Diduga struktur lapangan pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terselubung di Indonesia.